

MERANCANG DAN MENERAPAKAN MULTIKULTURALISME AGAMA DI INDONESIA

Oleh:

Adi Sudrajat

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

adi.sudrajat@unisma.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang multikulturalisme sebagai sebuah wacana dan kebijakan yang dirancang dan diterapkan di Indonesia. Lahirnya demokrasi pasca orde baru telah memberikan harapan baru bagi ekspresi identitas yang sebelumnya mengalami penindasan. Sedangkan selama itu literatur tentang multikulturalisme berfokus pada perbedaan etnis dan ras saja, artikel ini berusaha mengkaji lebih luas cakupan istilah dengan memasukkan perbedaan agama, dan lebih jelasnya multikulturalisme agama. Dengan pembahasan sebagai berikut: memahami dan menerapkan multikulturalisme di Indonesia, menjelaskan perbedaan multikulturalisme Barat dengan keberagaman di Indonesia (kebhinnekaan atau kemajemukan), heterogenitas (keberagaman) dan kesatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika), dan terakhir, menjelaskan konsep multikulturalisme yang diperluas untuk mengakomodasi multi-religiusitas.

Kata kunci: *Rancangan, Penerapan, Multikulturalisme Agama*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia lahir dalam sebuah peristiwa simbolik yang terjadi pada tahun 1928 ketika anak-anak muda dari berbagai penjuru nusantara berkumpul untuk mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda atas dasar satu tanah, satu bangsa dan satu. bahasa. Sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, mempersatukan Indonesia sebagai satu bangsa, Lebih lanjut, pembangunan bangsa di Indonesia merupakan proyek bersama yang belum selesai, yang sering menemui kontestasi dari berbagai identitas primordial.¹

Ideologi negara Pancasila memainkan peran penting dalam penyatuan berbagai kelompok agama, etnis, dan bahasa di Indonesia. Prinsip pertama dari ideologi tersebut menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menjanjikan lingkungan yang aman bagi berkembangnya agama, dengan harapan agama akan memainkan peran publik dalam mendefinisikan dan memelihara etika sosial.² Pancasila bisa dielu-elukan sebagai arketipe bagi beragam masyarakat di nusantara untuk membayangkan diri mereka sebagai

¹ Benedict Anderson, *Imagined communities*, London & New York: Verso, 2006

² Yudi Latif, *Negara paripurna: Historitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011

bangsa. Meminjam gagasan Charles Taylor tentang imajinasi sosial,³ yang dia sebut sebagai cara Orang membayangkan eksistensi sosialnya dalam kaitannya dengan keberadaan sesamanya, Pancasila merupakan perwujudan imajiner sosial modern orang Indonesia. Imajiner sosial ini mengusulkan tatanan sosial ideal yang dapat menentukan bagaimana anggota komunitas moral harus hidup. Karena setiap komunitas, dan bisa dibilang setiap individu, terjerat dalam jaringan imajinasi sosial yang berbeda-beda dan diperebutkan, akan selalu ada penolakan, dalam tingkat yang berbeda-beda, terhadap setiap perintah untuk menyesuaikan diri. Dengan demikian, Pancasila, meskipun merupakan khayalan sosial yang penting, dapat diterima dan ditolak. Akibatnya, idealisme kerukunan etnis dan agama yang tergabung dalam ideologi negara dan dicanangkan dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang pada waktunya harus direalisasikan di lapangan melalui intervensi negara dan kelembagaan.⁴

Pada tataran ideologis, Pancasila mengartikulasikan landasan filosofis dan cita-cita luhur bangsa, namun pada tatarannya jauh dari refleksi realitas sosial bangsa Indonesia. Ini sebagian karena penyalahgunaan ideologi nasional ini oleh pemerintah Orde Baru. Pluralitas etnis dan agama tidak pernah ditangani secara serius pada masa Orde Baru Suharto (1966–1998). Rezim secara resmi melarang wacana publik tentang perbedaan sosial, atau SARA (perbedaan etnis, agama, ras dan antar kelompok). Untuk memanfaatkan Pancasila untuk kepentingan politik, ideologi dipromosikan sebagai satu-satunya dasar bagi semua organisasi massa dan kelompok sosial-politik.⁵ Wacana dominan kemudian adalah agar orang Indonesia berasimilasi menjadi identitas nasional yang didefinisikan negara, berdasarkan interpretasi rezim terhadap Pancasila untuk kepentingannya sendiri. Para penentang rezim dengan mudah dicap sebagai anti-Pancasila, yang membenarkan penganiayaan mereka. Semangat pluralisme yang dianut oleh ideologi nasional itu justru menjadi alat utama rezim otoriter yang menindas. Mengingat manipulasi Pancasila oleh pemerintah Orde Baru, ideologi tersebut memudar dengan jatuhnya Suharto pada tahun 1998.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari proses demokratisasi, wacana multikulturalisme muncul di Indonesia pasca pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998.

³ Charles Taylor, *A secular age*. Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, hlm.171

⁴ Chang Yau Hoon, *Pancasila and the Christians in Indonesia: A leaky shelter? Asian Culture*, 37, 2013, h.29-46.

⁵ Michael Morfit, *Central government and local development in Indonesia*, Oxford: Oxford University Press, 1986, h.42

Namun demikian, pencabutan taktik senjata kuat dari atas ke bawah yang diterapkan selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang tak berkesudahan, misalnya dalam kebebasan untuk mengekspresikan keragaman etnis dan agama, juga berarti terbukanya pintu bagi tantangan antar-komunal. Berbagai episode kekerasan etnis, agama dan komunal meletus di seluruh Indonesia.⁶ Pancasila mulai goyah dalam menghadapi ideologi individualistik dan kelompok baru, serta kontestasi imajinasi sosial dan agama yang muncul dengan kuat selama era Reformasi.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengundang diskusi kritis tentang kemungkinan merancang dan menerapkan multikulturalisme yang sesuai dengan Indonesia. Ini mempertimbangkan bahasan-bahasan berikut: memahami dan menerapkan multikulturalisme di Indonesia, menjelaskan perbedaan multikulturalisme Barat dengan keberagaman di Indonesia (kebhinnekaan atau kemajemukan), heterogenitas (keberagaman) dan kesatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika), dan terakhir, menjelaskan konsep multikulturalisme yang diperluas untuk mengakomodasi multi-religiusitas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Subjek kajian membahas tentang filsafat pendidikan Islam dalam pembelajaran yang holistik. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Selain itu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). tulis ilmiah ini dilaksanakan untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Multikulturalisme dalam Krisis?

Selama dekade terakhir, multikulturalisme sebagai kebijakan telah diserang di seluruh Eropa dan di Australia.⁷ Banyak pemimpin negara Eropa telah menyatakan multikulturalisme sebagai kegagalan. Misalnya, dalam memperingati ulang tahun

⁶ Chang Yau Hoon, Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of ethnic Chinese in post-Suharto Indonesia, *Asian Ethnicity*, 7, 2006, h.149–166. doi:10.1080/14631360600734400

⁷ Gregory Noble, *Lines in the sand: The Cronulla riots, multiculturalism and national belonging*. Sydney: Institute of Criminology Press, 2009.

pertama pemboman London, surat kabar Inggris, Daily Mail, bahkan sampai menerbitkan tajuk utama bahwa Multikulturalisme sudah mati.⁸ Serangan balik terhadap multikulturalisme dipicu oleh kepanikan moral, serta kegagalan Eropa untuk mengintegrasikan imigran Muslimnya. Seperti yang dikatakan Malik dengan tepat, Target sebenarnya dari banyak kritik ini, bagaimanapun, bukanlah multikulturalisme tetapi imigrasi dan imigran - terutama Muslim.⁹

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kritik di balik serangan balik terhadap multikulturalisme, Vertovec dan Wessendorf telah menguraikan klaim-klaim berikut oleh para kritikus:¹⁰

- a. Multikulturalisme adalah satu doktrin - para kritikus telah menghomogenkan multikulturalisme sebagai ideologi tunggal dan tetap, sehingga lebih mudah untuk diikuti.
- b. Multikulturalisme menahan perdebatan - kritikus berpendapat bahwa multikulturalisme menciptakan suasana di mana kebenaran politik telah membuat subjek yang berkaitan dengan ras dan agama tabu dan tak tersentuh.
- c. Multikulturalisme telah memupuk keterpisahan dan menolak nilai-nilai umum - kritikus mengklaim bahwa multikulturalisme mendorong pemisahan etnis, penolakan terhadap nilai-nilai bersama dan kurangnya integrasi sosial.
- d. Multikulturalisme menyangkal masalah - kritikus berpendapat bahwa multikulturalisme menolak untuk mengakui masalah sosial yang berkaitan dengan imigran dan etnis minoritas.
- e. Multikulturalisme mendukung praktik tercela - kritik menyerang multikulturalisme atas dasar relativisme budaya yang, kata mereka, mendukung perlakuan yang sama terhadap semua budaya, dan mengasumsikan bahwa semua aspek dari setiap budaya adalah baik.
- f. Multikulturalisme menyediakan tempat berlindung bagi teroris - kritikus memanfaatkan faktor ketakutan dan wacana terorisme dalam serangan mereka terhadap multikulturalisme.

⁸ Daily Mail, *Multiculturalism is dead, say academics*, 7 July 2006., <http://www.dailymail.co.uk/news/article-394566/Multiculturalism-dead-say-academics.html>

⁹ Kenan Malik, *Assimilation's failure, terrorism's rise*. The New York Times, 2011

¹⁰ Steven Vertovec, & Susanne Wessendorf, *The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices*. London: Routledge, 2010.

Sebagai hasil dari reaksi balik ini, istilah multikulturalisme telah diganti dengan istilah keanekaragaman. Memiliki Keragaman dan Inklusi menjadi slogan baru di banyak struktur dan industri perusahaan di mana perbedaan budaya, agama, etnis, kemampuan fisik, gender dan seksualitas dihargai dan diakui.¹¹

Meskipun beberapa kritik multikulturalisme yang diuraikan di atas valid, orang harus memperhatikan konteks sosial ekonomi tempat kritik tersebut dikembangkan. Sampai batas tertentu, kritik merefleksikan kecemasan tentang perbedaan agama yang disebabkan oleh migrasi, dan bisa dibilang merupakan reaksi yang didasarkan pada ketidakmampuan untuk menahan kecemasan.

Sebagai model yang dirancang bagi masyarakat migran di Barat seperti Kanada, Australia, dan Amerika untuk, pertama dan terutama, dengan beragam latar belakang dan budaya migran baru, multikulturalisme mengistimewakan ras, budaya, dan etnis. Karena demokrasi liberal ini cenderung menjunjung tinggi prinsip sekularisme di mana agama dan politik dipisahkan dalam lingkungan yang berbeda, wacana agama secara khusus tidak ada dalam kebijakan multikulturalisme mereka.¹² Sementara menurut Peter Berger, kini telah diganti gagasan sekularisasi dengan pluralisasi, yang menunjukkan bahwa negara atau individu dapat menjadi sekuler dan beragama, pengabaian agama dalam wacana multikulturalisme masa kini masih mencerminkan paradigma lama.¹³ Para sarjana seperti Levey, Werbner, mengakui bahwa model multikulturalisme separatis gagal memenuhi tuntutan warga beragama untuk pengakuan dan akomodasi karena budaya menjadi eufemisme untuk agama. Namun demikian, dengan semakin banyaknya migran Muslim di Eropa dalam beberapa dekade terakhir, bersamaan dengan peningkatan religiusitas dan semangat beragama di banyak belahan dunia, tuntutan untuk pengakuan dan akomodasi agama tidak dapat lagi diabaikan. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir diskusi tentang multikulturalisme telah bergeser dengan memperhitungkan beragam identitas agama dalam negara sekuler.¹⁴

¹¹ Steven Vertovec, & Susanne Wessendorf, *The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices*. London: Routledge, 2010, hlm.18-19

¹² Geoffrey Brahm Levey & Tariq Modood, *Secularism, religion and multicultural citizenship*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, h.24

¹³ Peter Berger, Further thoughts on religion and modernity, *Society*, 49, 2012, h.313–316. doi: 10.1007/s12115-012-9551-y

¹⁴ Lori G. Beaman, *Reasonable accommodation: Managing religious diversity*. Vancouver: University of British Columbia Press, 2012.

Stuart Hall dengan tepat menunjukkan bahwa masalah sebenarnya dari multikulturalisme terletak pada kenyataan bahwa “isme” cenderung mengubah multikulturalisme menjadi doktrin politik. Padahal, kritik terhadap multikulturalisme yang dirangkum di atas dibangun dengan asumsi bahwa multikulturalisme adalah doktrin tunggal. Penting untuk diingat bahwa multikulturalisme bukanlah kebijakan satu ukuran untuk semua, tetapi merupakan pekerjaan yang sedang berjalan. Ini adalah konsep cair yang mencakup banyak sekali wacana, kebijakan, dan praktik. Kritikus cenderung menghomogenkan konsep tersebut menjadi “isme” tunggal untuk dengan mudah mendiskreditkan ideologi bersama dengan para pendukungnya, yaitu kaum liberal dan aktivis minoritas.¹⁵

Malory Nye mengatakannya sebagai berikut: ini bukan 'kegagalan multikulturalisme' tetapi lebih merupakan kegagalan untuk mengembangkan konteks multikulturalisme secara efektif....¹⁶ Untuk beradaptasi dengan politik identitas baru di dunia yang semakin mengglobal dan kompleks, multikulturalisme harus fleksibel dan dapat ditempa. Alih-alih mengutuk multikulturalisme sebagai kegagalan, wacana harus diartikulasikan kembali dan dirumuskan kembali Wieviorka sesuai dengan konteks sosial-budaya dan politik-ekonomi saat ini dari masyarakat tertentu seperti Indonesia.¹⁷ Jenis baru multikulturalisme yang lebih inklusif, akan memberikan pertimbangan serius pada agama, dan perlu memfasilitasi keterbukaan dan dialog antarbudaya atau antaragama.¹⁸ Kerangka baru multikulturalisme agama yang akan dibahas di bawah ini.

2. Multikulturalisme Agama untuk Indonesia

Tepat sebelum rezim Suharto runtuh pada tahun 1998, Persaingan diskursif antara asimilasi, multikulturalisme, dan subjektivitas kepemilikan bersyarat belum terjadi di Indonesia. Sejauh ini aturan wacana asimilasi. Kemungkinan berkembangnya multikulturalisme masih jauh. Jelas tidak menyangka bahwa jatuhnya Soeharto tidak hanya akan mengakhiri asimilasi ideologi Orde Baru, tetapi juga membuka ruang baru bagi kebangkitan politik identitas di seluruh Indonesia. Salah

¹⁵ Steven Vertovec, & Susanne Wessendorf, *The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices*. London: Routledge, 2010, hlm. 6-7

¹⁶ Malory Nye, The challenges of multiculturalism. *Culture and Religion*, 8, 2007, h. 109–123. doi:10.1080/14755610701458915

¹⁷ Michel Wieviorka, Multiculturalism: A concept to be redefined and certainly not replaced by the extremely vague term of interculturalism. *Journal of Intercultural Studies*, 33, 2012, 225–231. doi:10.1080/07256868.2012.649530

¹⁸ Pnina Werbner, Multiculturalism from above and below: Analysing a political discourse. *Journal of Intercultural Studies*, 33, 2012, 197–209. doi:10.1080/07256868.2012.649527

satu perubahan besar dalam kebijakan pemerintah pasca Suharto adalah ditinggalkannya kebijakan asimilasi. Selama dekade terakhir ini, para sarjana telah membahas kegunaan multikulturalisme dalam konteks Indonesia, terutama mengacu pada urgensi penerapan pendidikan multikultural (misalnya Ujan,¹⁹ Tilaar,²⁰ dan Yaqin,²¹). Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia secara konsisten menerapkan kebijakan multikulturalisme, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya serius untuk mempromosikan multikulturalisme di sekolah melalui kurikulum baru yang diterapkan pada 2013: pencantuman eksplisit kata multikulturalisme dalam Tujuan mata pelajaran seperti Studi Kewarganegaraan dan Antropologi menunjukkan relevansi mutlak multikulturalisme di Indonesia, dan menunjukkan pengakuan internal yang kuat akan kebutuhan untuk mempromosikan multikulturalisme di antara anak-anak, generasi masa depan Indonesia. Lebih lanjut, organisasi seperti Wahid Institute dan Ma'arif Institute, yang didirikan oleh mantan pemimpin dari dua organisasi Muslim arus utama terbesar - NU dan Muhammadiyah - dengan gencar mempromosikan multikulturalisme;

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, arti dan tujuan politik multikulturalisme bervariasi di antara kelompok kepentingan yang berbeda. Ruang publik yang dinamis di era Reformasi telah memungkinkan munculnya suara-suara yang sebelumnya tertindas. Memanfaatkan suasana baru demokrasi, kelompok marginal seperti etnis Tionghoa, komunitas LGBTIQ dan sejumlah kelompok agama minoritas yang tidak diakui secara formal oleh negara menuntut pengakuan atas identitas dan haknya. Meskipun tidak ada kebijakan atau pedoman yang jelas dari negara Indonesia untuk melembagakan multikulturalisme (kecuali pendidikan multikultural), proses demokratisasi telah memungkinkan tuntutan tersebut. Dari semua kelompok minoritas, etnis Tionghoa di negara ini paling diuntungkan dari proses Reformasi, karena kita menyaksikan pembubaran tindakan diskriminatif resmi dan pemulihan hak budaya dan kewarganegaraan mereka.²² Hal ini juga karena, dari semua suku bangsa, etnis

¹⁹ Ata Ujan Andre, *Multikulturalisme: Belajar hidup bersama dalam perbedaan*, Jakarta: Indeks, 2009.

²⁰ Tilaar, H. A. R. *Multikulturalisme: Tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

²¹ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

²² Chang Yau Hoon, *Chinese identity in post-Suharto Indonesia: Culture, politics and media*. Brighton & Portland: Sussex Academic Press, 2008.

Tionghoa termasuk yang paling terpinggirkan dalam hal hak budaya, bahasa dan kewarganegaraan.²³

Meski demikian, optimisme tentang multikulturalisme di Indonesia tidak boleh dilebih-lebihkan. Beberapa pemimpin Indonesia memiliki keraguan tentang multikulturalisme karena memunculkan ketakutan lama akan federalisme, relativisme, dan perpecahan. Lebih lanjut, pendukung multikulturalisme terbatas pada masyarakat sipil yang baru berkembang, dan wacana multikulturalisme diperkenalkan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses demokratisasi dan desentralisasi pasca-Suharto.²⁴ Wacana publik tentang multikulturalisme masih terbatas pada surat kabar utama berbahasa Inggris. Seperti yang diamati Lyn Parker, gagasan multikulturalisme masih terdengar asing di Indonesia; istilah lokal seperti kemajemukan (pluralitas), keragaman (Heterogenitas) dan kebhinnekaan (keanekaragaman) lebih diutamakan.²⁵ Raihani melakukan observasi serupa berdasarkan penelitian etnografinya tentang pendidikan multikultural di pesantren di Indonesia. Dia mencatat bahwa multikulturalisme adalah kata baru bagi banyak responden, terutama pelajar.²⁶

Ada dua isu utama tentang relevansi multikulturalisme bagi Indonesia yaitu: Yang pertama terkait dengan sifat dan asal mula multikulturalisme, yang dipandang sebagai paham individualis yang muncul di Barat untuk menghadapi pendatang dan budaya mereka. Para sarajana berpendapat bahwa walaupun Indonesia memiliki keragaman etnis, namun bukan merupakan masyarakat migran. Lebih jauh lagi, karakter komunalnya berarti multikulturalisme tidak berlaku di Indonesia. Hal kedua yang mereka angkat adalah bahwa paham-paham lokal tentang keberagaman, termasuk ideologi negara Pancasila dan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan dan melindungi hak-hak berbagai agama dan kelompok budaya untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Berkaitan dengan pertanyaan kesesuaian multikulturalisme dengan konteks Indonesia, perlu disadari bahwa meskipun wacana dan kebijakan multikulturalisme bersumber dari Barat, tidak berarti eksklusif hanya di Barat. Multikulturalisme juga

²³ Dewi Anggraeni, Does multicultural Indonesia include its ethnic Chinese? *Wacana*, 13, 2011, h. 256–278.

²⁴ Burhanuddin, *Mencari akar kultural civil society di Indonesia*. Ciputat: Indonesian Institute for Civil Society, 2003.

²⁵ Lyn Parker & Chang Yau Hoon, Secularity, religion and the possibilities for religious citizenship. *Asian Journal of Social Sciences*, 41, 2013, 150–174. doi:10.1163/15685314-12341296

²⁶ Raihani, *Creating multicultural citizens: A portrayal of contemporary Indonesian education*. London & New York: Routledge, 2014.

bukan merupakan formula yang ditetapkan yang dapat dialihkan ke masyarakat mana pun. Stuart Hall mengingatkan kita bahwa "Seperti halnya masyarakat multi-budaya yang berbeda, ada multikulturalisme yang sangat berbeda"²⁷ Dengan kata lain, multikulturalisme bukanlah sekumpulan doktrin baru; sebaliknya, ini adalah sebuah proses, yang "selalu kontekstual dengan tempat dan pengalaman budaya tertentu."²⁸ Masyarakat non-Barat memiliki sejarah tantangan pluralis mereka sendiri dan kebutuhan mereka sendiri untuk merancang formula yang bermakna untuk resolusinya. Oleh karena itu, kontekstualitas perlu diakui dalam setiap diskusi multikulturalisme di luar Barat. Pertanyaan yang lebih berguna untuk ditanyakan adalah apakah Indonesia memiliki tiga prasyarat untuk multikulturalisme yang diidentifikasi oleh Kymlicka: demografi imigran, kesadaran hak dan demokrasi. Bagaimana minoritas / mayoritas dan pribumi / non-pribumi dikategorikan di Indonesia?²⁹

Demografi Indonesia, meski berbeda dengan masyarakat migran di negara-negara seperti AS, Australia, dan Singapura, tidak kalah beragam. Meskipun imigrasi dari negara lain jarang terjadi di Indonesia, kebijakan transmigrasi, terutama di bawah Orde Baru, telah menghasilkan komunitas yang beragam. Aspirasi para pemukim baru ini untuk mengekspresikan identitas mereka pada saat yang sama saat mereka memantapkan diri sebagai komunitas yang layak secara sosial, ekonomi dan ekologis tidak ditujukan oleh negara, karena hanya tertarik untuk menyebarkan budaya nasional yang homogen.³⁰ Dengan demokrasi dan kesadaran hak yang berkembang, Indonesia perlu mengatur kerangka multikulturalisme yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks demografisnya. Kerangka baru ini juga harus mempertimbangkan apa yang oleh Goh disebut sebagai multikulturalisme pascakolonial, atau kebutuhan untuk menantang struktur ras dan kelas yang diberlakukan oleh penjajah.³¹

Lebih jauh, multikulturalisme adalah wacana global, yang telah menarik perhatian di Asia karena negara-bangsa mencari cara untuk mengakomodasi populasi

²⁷ S. Hall, *Conclusion: The multicultural question*, London: Zed Books, 2000, hlm.210

²⁸ Malory Nye, The challenges of multiculturalism, *Culture and Religion*, 8, 2007, h. 109–123. doi:10.1080/14755610701458915

²⁹ Will Kymlicka, *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

³⁰ Brian A. Hoey, Nationalism in Indonesia: Building imagined and intentional communities through transmigration. *Ethnology*, 42, 2003, h.109–126.

³¹ Daniel P. S. Goh (Ed.), *Race and multiculturalism in Malaysia and Singapore*, London & New York: Routledge, 2009.

yang semakin beragam dan kompleks di tengah kekuatan globalisasi migrasi dan demokratisasi.³²

Penerapan kerangka multikulturalisme global di Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengutamakan wacana Barat melainkan untuk memahami keadaan budaya dan sosiologis yang membuat tanggapan yang berbeda terhadap masalah pluralisme dan kewarganegaraan menjadi mungkin.³³

Untuk meluncurkan rancangan multikulturalisme di Indonesia, artikel ini mengemukakan tiga pertimbangan:

- a. Multikulturalisme harus menjaga keseimbangan antara persatuan dan keragaman. Ien Ang berpendapat bahwa gagasan bangsa multikultural yang bersatu - bersatu dalam keanekaragaman adalah konsep yang ambigu dan paradoks secara inheren, dan bahwa ketegangan antara persatuan dan keragaman tidak pernah dapat diselesaikan.³⁴ Akan tetapi Nye berpendapat bahwa multikulturalisme bukanlah kebalikan dari nasionalisme karena sebagai suatu kebijakan, multikulturalisme menyangkut masalah dan proses yang tertanam dalam konstruksi dan pembangunan identitas nasional.³⁵
- b. Multikulturalisme harus memberikan ruang untuk mengakui lintas batas budaya dan hibriditas. Alih-alih menjadi tampilan dari pilihan individu monokultural, menjadi multikultural adalah tentang pengakuan keberadaan pengaruh budaya yang berbeda dalam setiap individu. Selain itu, pemahaman multikulturalisme pada level mikro”individu ini juga dapat diterjemahkan ke dalam level makro sosial, terutama dalam akomodasi negara tidak hanya terhadap keberadaan kelompok etnis yang berbeda tetapi juga keberagaman dalam setiap kelompok etnis.³⁶
- c. Multikulturalisme perlu memasukkan agama. Poin ini akan dibahas lebih lanjut di bawah.

³² Will Kymlicka, *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

³³ Robert W. Hefner (Ed.), *Politics of multiculturalism: Pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Hawaii: University of Hawaii Press, 2001, hlm.4

³⁴ Ien Ang, *On not speaking Chinese: Living between Asia and the West*. London & New York: Routledge, 2001.

³⁵ Malory Nye, The challenges of multiculturalism. *Culture and Religion*, 8, 2007, h. 109–123. doi:10.1080/14755610701458915

³⁶ Chang Yau Hoon, Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of ethnic Chinese in post-Suharto Indonesia. *Asian Ethnicity*, 7, 2006, h. 149–166. doi:10.1080/14631360600734400

Isu kedua yang diangkat dalam kutipan di atas menyangkut kecukupan ideologi lokal yang ada. Sebagai landasan filosofis Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah gagasan berjasa yang mewakili inklusivitas dan keberagaman Indonesia. Namun, kedua ideologi tersebut jauh dari mencerminkan realitas sosial Indonesia. Berakhirnya Orde Baru telah melihat Pancasila terdemistifikasi. Dengan serbuan ide-ide baru yang menyertai arus globalisasi dan informasi ke masyarakat lain seperti kebangkitan Islamisme di Timur Tengah dengan Arab Spring. Pancasila kini menjadi salah satu pilihan di pasar ideologis demokrasi. Reformasi tampaknya telah memberikan kebebasan demokrasi kepada rakyat Indonesia, tetapi ruang ini juga memberi ruang bagi kelompok-kelompok agama garis keras, radikal dan eksklusif untuk tumbuh. Hasilnya adalah meningkatnya intoleransi agama dan kekerasan antaragama.

Intoleransi beragama sedang meningkat di Indonesia.³⁷ Meskipun Indonesia telah membuat langkah besar dalam mengkonsolidasikan pemerintahan yang stabil dan demokratis setelah lima dekade pemerintahan otoriter, negara ini sama sekali bukan benteng toleransi. Hak-hak agama dan etnis minoritas terus menerus diinjak-injak. Meskipun Konstitusi Indonesia melindungi kebebasan beragama, peraturan yang melarang penodaan agama dan dakwah secara rutin digunakan untuk menuntut ateis, Bahais, Kristen, Syiah, Sufi, dan penganut agama Ahmadiyah. Pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 150 peraturan bermotif agama yang membatasi hak-hak minoritas.³⁸

Tidak terbayangkan bagi kaum minoritas untuk membayangkan hidup di negara berpenduduk Muslim terbesar ini tanpa perlindungan dari nilai-nilai netral agama yang diatur dalam Pancasila dan Konstitusi, tetapi juga jelas bahwa prinsip-prinsip yang diuraikan dalam ideologi nasional dan Konstitusi telah tidak diamati atau dihormati oleh negara itu sendiri.

Bukan berarti Pancasila telah kehilangan relevansinya di Indonesia. Bahkan, menanggapi tumbuhnya radikalisme di Indonesia, aktivis lintas agama, pemuka agama dan akademisi kini menyerukan kepada negara dan masyarakat Indonesia untuk merebut kembali, menghidupkan kembali Pancasila.³⁹ Ada pula usulan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan

³⁷ Benedict Rogers, Indonesia's rising religious intolerance. *The New York Times*, 21 May 2012.

³⁸ Andreas Harsono, No model for Muslim democracy, *The New York Times*, 21 May 2010

³⁹ Franz Magnis Suseno, Back to Pancasila ideals: Why? *The Jakarta Post*, 1 June, 2011.

kembali ideologi Pancasila melalui seni, budaya dan pendidikan, dengan cara yang berbeda dengan zaman Orde Baru. Upaya tersebut menandakan harapan bahwa Pancasila kembali teraktualisasipada akhirnya dapat menyatukan kembali masyarakat, mengembalikan nilai toleransi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Saya berpendapat bahwa tata kelola multikulturalis penting untuk mengelola keragaman Indonesia. Lebih khusus lagi, corak multikulturalisme ini, yang saya sebut multikulturalisme agama, harus memperhatikan agama secara serius, dan pada saat yang sama, menggabungkan dan melengkapi ideologi lokal yang ada, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Multikulturalisme agama, sebagaimana digunakan dalam artikel ini, terutama berkaitan dengan ketidakcukupan mode multikulturalisme saat ini dalam mengakomodasi agama minoritas. Sementara pengertian multikulturalisme terutama berkaitan dengan budaya, pluralisme terutama difokuskan pada agama. Namun, pluralisme diperdebatkan dalam bidang agama karena dianggap berasosiasi dengan liberalisme, sekularisme, dan relativisme. Dengan beban seperti itu, dan juga dengan kurangnya struktur formal dan pemerintahan, multikulturalisme agama yang diadvokasi dalam pasal ini mengharuskan negara dan agama untuk berperan aktif dalam mendorong toleransi dan hidup berdampingan secara harmonis.

Multikulturalisme agama berfokus pada pemerintahan dan membutuhkan keterlibatan dinamis negara untuk melindungi penduduk beragama, terutama agama minoritas.⁴⁰ Para ahli semakin setuju bahwa beberapa bentuk manajemen multikulturalisme negara diperlukan agar kebijakan dapat berjalan. Misalnya, Nye berpendapat bahwa manajemen dan tata kelola multikulturalisme diperlukan, untuk memastikan bahwa ada penghormatan yang luas dan efektif terhadap keragaman, sementara pada saat yang sama ada elemen kohesi dan identitas Bersama, landasan bersama di mana masyarakat dan bangsa bekerja sebagai lebih dari sekumpulan keanekaragaman.⁴¹ Sayangnya, demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia belum mengarah pada kebijakan publik yang universal, kreatif dan inklusif untuk keragaman

⁴⁰ Augie Fleras, *The politics of multiculturalism: Multicultural governance in comparative perspective*, New York, NY: Palgrave Macmillan. 2009, h.22

⁴¹ Tariq Modood, Moderate secularism, religion as identity and respect for religion. *The Political Quarterly*, 81, 2010, h. 4–14. doi:10.1111/j.1467-923X.2010.02075.x

budaya dan agama.⁴² Faktanya, Indonesia telah berjuang untuk menahan faksionalisme dan kekerasan komunal dan agama sejak tahun-tahun terakhir rezim otoriter Presiden Suharto dan pembukaan ruang publik secara tiba-tiba setelah kejatuhannya. Selain itu, negara diam di tengah meningkatnya iklim intoleransi agama dan contoh-contoh kekerasan terhadap minoritas yang mengkhawatirkan.⁴³ Sejauh ini, berbagai deklarasi resmi penghormatan dan penghargaan untuk keragaman budaya tetap retorika kosong, yang telah menyebabkan wacana publik.

Bryan Turner mengambil pandangan kritis tentang politik pengakuan yang merayakan keragaman dengan mengorbankan kesetaraan dan keadilan. Dia berpendapat bahwa ketegangan antara identitas transnasional dari agama neo-fundamentalis (Kristen, Muslim, Yahudi tetapi juga Hindu dan Buddha) dan identitas kewarganegaraan berbasis negara harus diselesaikan dengan pembentukan sebuah kerangka hukum dan politik umum, yaitu kewarganegaraan. Karenanya, Parker dan Hoon memperjuangkan kewarganegaraan beragama di Indonesia, yang menyerukan pemerintah proaktif yang secara eksplisit mengintervensi pihak minoritas, untuk melindungi hak konstitusional mereka atas kebebasan beragama. Kewarganegaraan lebih dari sekedar status hukum atau kategori administratif; ini mencakup praktik politik, serta mode partisipasi dalam kehidupan publik. Keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi keagamaan non-pemerintah dan lembaga keagamaan dapat dianggap sebagai tindakan kewarganegaraan beragama.⁴⁴

Dua prinsip penting dapat diadaptasi dari Kymlicka bekerja pada kewarganegaraan multikultural: (1) negara harus dilihat sebagai milik yang setara dengan semua warga negara, dan (2) individu harus dapat mengakses institusi negara, dan berpartisipasi secara penuh dan setara sebagai warga negara dalam kehidupan politik, tanpa harus menyangkal mereka identitas agama.⁴⁵ Negara adalah pemain kunci dalam penegakan tatanan moral melalui supremasi hukum sehingga persamaan hak dapat dinikmati oleh semua warga negara, namun peran negara dalam menegakkan perdamaian dan stabilitas tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia,

⁴² Tod Jones, Indonesian cultural policy in the reformed era. *Indonesia*, 93, 2012, h. 147–176.

⁴³ International Crisis Group, Indonesia: “Christianization” and intolerance. Asia Briefing No. 114, 24 November, 2010, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B114-indonesia-christianisation-and-intolerance.aspx>

⁴⁴ Lyn Parker & Chang Yau Hoon, Secularity, religion and the possibilities for religious citizenship. *Asian Journal of Social Sciences*, 41, 2013, h. 150–174. doi:10.1163/15685314-12341296

⁴⁵ Will Kymlicka, *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*, Oxford: Oxford University Press, 2010.

seperti yang sering terjadi pada rezim Suharto. Oleh karena itu, negara perlu menerapkan pluralisme yang wajar agar toleransi terhadap perbedaan dapat didorong dan kekuatan politik yang memaksa tidak digunakan untuk memaksakan kepatuhan pada non-Muslim.⁴⁶

Sementara fungsi negara sangat penting untuk menerapkan multikulturalisme yang dilembagakan, peran ini dapat menjadi paradoks: di satu sisi, negara dapat mencegah permusuhan dan kekerasan dengan menjaga kerukunan agama dan ras. Di sisi lain, multikulturalisme negara seringkali memperkuat batasan ras dan agama dalam upaya menjaga kerukunan, dengan mencegah terjadinya interaksi organik dan hibriditas antar kelompok. Di Indonesia, paradoks tata kelola multikultural terlihat ketika Kementerian Agama yang dibentuk untuk mengatur urusan agama, dalam banyak kesempatan telah membatasi kebebasan beragama; dan, di sisi lain, ketika polisi gagal menegakkan hukum dan ketertiban dalam menghadapi kekerasan komunal, dan sistem hukum gagal memberikan keadilan bagi korban kekerasan agama.⁴⁷ Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan negara dalam memastikan perlindungan hak-hak minoritas dan toleransi perbedaan di ruang publik, sementara pada saat yang sama memberikan ruang bagi partisipasi sipil dan pemupukan lintas budaya secara organik di antara warga negara.

D. KESIMPULAN

Artikel ini telah mencoba menjelaskan konsep-konsep yang berbelit-belit dari multikulturalisme, pluralisme dan agama, serta cara-cara mereka saling terkait dan berpotongan, yang seringkali berantakan, berbaur, dan kompleks. Ini telah menghadirkan kasus untuk wacana global multikulturalisme untuk secara serius dianggap sebagai praktik kebijakan di Indonesia. Dengan mengakui kebungkaman yang mencolok tentang agama dalam teori multikulturalisme, yang secara konvensional mengistimewakan ras, budaya dan etnis, artikel tersebut mengusulkan multikulturalisme agama sebagai alternatif konseptual dari pluralisme agama. Multikulturalisme agama mempromosikan gagasan negara aktif yang melindungi agama minoritas dan memasukkan Pancasila yang inklusif ideologi nasional dalam kerangka kerjanya. Konsep ini dapat menghindari beban dan stigma bahwa pengertian "pluralisme agama", namun mendorong batas-batas

⁴⁶ Catriona McKinnon, & Dario Castiglione, *The culture of tolerance in diverse societies: Reasonable tolerance*, Manchester & New York: Manchester University Press, 2009.

⁴⁷ Pnina Werbner, Multiculturalism from above and below: Analysing a political discourse. *Journal of Intercultural Studies*, 33, 2012, h. 197–209. doi:10.1080/07256868.2012.649527

teori multikulturalisme yang ada untuk memasukkan identitas agama dan agama minoritas. Sementara isi substantif tentang bagaimana multikulturalisme agama dapat dilembagakan berada di luar cakupan diskusi saat ini, dapat diharapkan bahwa multikulturalisme agama dapat dipromosikan melalui pendidikan dan kegiatan lintas agama, di mana keterlibatan, pemahaman, perjumpaan dan dialog yang dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, *Imagined communities*, London & New York: Verso, 2006
- Andre, Ata Ujan, *Multikulturalisme: Belajar hidup bersama dalam perbedaan*, Jakarta: Indeks, 2009.
- Ang, Ien, *On not speaking Chinese: Living between Asia and the West*. London & New York: Routledge, 2001.
- Anggraeni, Dewi, multicultural Indonesia include its ethnic Chinese? *Wacana*, 13, 2011, h. 256–278.
- Berger, Peter, Further thoughts on religion and modernity, *Society*, 49, 2012, h.313–316. doi: 10.1007/s12115-012-9551-y
- Brahm Levey, Geoffrey & Modood, Tariq, *Secularism, religion and multicultural citizenship*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009,
- Burhanuddin, *Mencari akar kultural civil society di Indonesia*. Ciputat: Indonesian Institute for Civil Society, 2003.
- Daily Mail, *Multiculturalism is dead, say academics*, 7 July 2006., <http://www.dailymail.co.uk/news/article-394566/Multiculturalism-dead-say-academics.html>
- Fleras, Augie, *The politics of multiculturalism: Multicultural governance in comparative perspective*, New York, NY: Palgrave Macmillan, 2009,
- G. Beaman, Lori, *Reasonable accommodation: Managing religious diversity*. Vancouver: University of British Columbia Press, 2012.
- Goh D. P. S. (Ed.), *Race and multiculturalism in Malaysia and Singapore*, London & New York: Routledge, 2009.
- H. A. R., Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Hall, S., *Conclusion: The multicultural question*, London: Zed Books, 2000,
- Harsono, Andreas, No model for Muslim democracy, *The New York Times*, 21 May 2010
- Hefner, R. W. (Ed.), *Politics of multiculturalism: Pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Hawaii: University of Hawaii Press, 2001,
- Hoey, B. A. Nationalism in Indonesia: Building imagined and intentional communities through transmigration. *Ethnology*, 42, 2003, h.109–126.
- Hoon, Chang Yau, Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of ethnic Chinese in post-Suharto Indonesia, *Asian Ethnicity*, 7, 2006, h.149–166. doi:10.1080/14631360600734400
- Hoon, Chang Yau, *Chinese identity in post-Suharto Indonesia: Culture, politics and media*. Brighton & Portland: Sussex Academic Press, 2008.
- Hoon, Chang Yau, *Pancasila and the Christians in Indonesia: A leaky shelter?* *Asian Culture*, 37, 2013, h.29-46.
- International Crisis Group, Indonesia: “Christianization” and intolerance. Asia Briefing No. 114, 24 November, 2010, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B114-indonesia-christianisation-and-intolerance.aspx>
- Jones, Tod, Indonesian cultural policy in the reformed era. *Indonesia*, 93, 2012, h. 147–176.
- Kymlicka, Will, *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Latif, Yudi, *Negara paripurna: Historitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011
- Magnis Suseno, F, Back to Pancasila ideals: Why? *The Jakarta Post*, 1 June, 2011.
- Malik, Kenan, *Assimilation’s failure, terrorism’s rise*. The New York Times, 2011
- McKinnon, Catriona & Castiglione, D. *The culture of tolerance in diverse societies: Reasonable tolerance*, Manchester & New York: Manchester University Press, 2009.

- Modood, Tariq, Moderate secularism, religion as identity and respect for religion. *The Political Quarterly*, 81, 2010, h. 4–14. doi:10.1111/j.1467-923X.2010.02075.x
- Morfit, Michael, *Central government and local development in Indonesia*, Oxford: Oxford University Press, 1986,
- Noble, Gregory, *Lines in the sand: The Cronulla riots, multiculturalism and national belonging*. Sydney: Institute of Criminology Press, 2009.
- Nye, Malory, The challenges of multiculturalism, *Culture and Religion*, 8, 2007, h. 109–123. doi:10.1080/14755610701458915
- Parker, Lyn & Hoon, Chang Yau, Secularity, religion and the possibilities for religious citizenship. *Asian Journal of Social Sciences*, 41, 2013, 150–174. doi:10.1163/15685314-12341296
- Raihani, *Creating multicultural citizens: A portrayal of contemporary Indonesian education*. London & New York: Routledge, 2014.
- Rogers, Benedict, Indonesia's rising religious intolerance. *The New York Times*, 21 May 2012.
- Taylor, Charles, *A secular age*. Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007,
- Vertovec, Steven, & Wessendorf, Susanne, *The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices*. London: Routledge, 2010.
- Werbner, Pnina, Multiculturalism from above and below: Analysing a political discourse. *Journal of Intercultural Studies*, 33, 2012, 197–209. doi:10.1080/07256868.2012.649527
- Wieviorka, Michel, Multiculturalism: A concept to be redefined and certainly not replaced by the extremely vague term of interculturalism. *Journal of Intercultural Studies*, 33, 2012, 225–231. doi:10.1080/07256868.2012.649530
- Yaqin, M. Ainul, *Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.